



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA PADA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memberikan kepastian hukum, maka diperlukan penetapan desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi desa yang telah mendapatkan kode desa, dimana hasil inventarisasi dijadikan dasar untuk menetapkan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Penetapan Desa Pada Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PENETAPAN DESA PADA WILAYAH ADMINISTRASI
KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Penentuan Batas Desa adalah proses atau cara untuk menentukan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

Pasal 2

Penetapan Desa di Kabupaten Konawe terdiri dari:

- a. Penetapan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- b. Penetapan Desa karena adanya penggabungan desa.

Pasal 3

- (1) Penetapan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode dan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan desa karena adanya penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penetapan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal terdapat perubahan nama desa tetap dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kode desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas desa.
- (2) Ketentuan mengenai penegasan dan penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Penetapan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini, berada pada wilayah administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Konawe.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Di undangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 240.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 4/50/2020

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DESA PADA WILAYAH ADMINISTRASI
 KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENETAPAN DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG KODE DAN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA
1.	LAMBUYA		
		1.AWULITI	74.02.01.2006
		2.ASAKI	74.02.01.2007
		3.AMBERI	74.02.01.2011
		4.WAWORAHA	74.02.01.2012
		5.TANGGOBU	74.02.01.2015
		6.MERAKA	74.02.01.2027
		7.WONUA HOA	74.02.01.2035
		8.WATAREMA	74.02.01.2036
		9.TETEMBOMUA	74.02.01.2037
2.	WAWOTOB		
		1.KASUMEWUHO	74.02.03.2031
		2.NARIO INDAH	74.02.03.2013
		3.KARANDU	74.02.03.2025
		4.KORUMBA	74.02.03.2026
		5.ANGGOTOA	74.02.03.2017
		6.ANALAHUMBUTI	74.02.03.2018
		7.KUKULURI	74.02.03.2032
4.	PONDIDAHA		
		1.HONGOA	74.02.04.2013
		2.MUMUNDOWU	74.02.04.2016
		3.AHUAWATU	74.02.04.2019
		4.TIRAWUTA	74.02.04.2025
		5.AMBUULANU	74.02.04.2030
		6.BELATU	74.02.04.2031
		7.AMESIU	74.02.04.2034
		8.PUUMBINISI	74.02.04.2035
		9.WAWOLEMO	74.02.04.2039
		10.SULEMANDARA	74.02.04.2045
		11.LALODANGGE	74.02.04.2046
		12.WAWOLAHUMBUTI	74.02.04.2047
		13.LALOIKA	74.02.04.2048
		14.LALONGGOTOMI	74.02.04.2049
		15.WONUA MANDARA	74.02.04.2050
		16.WONUA MONAPA	74.02.04.2051
		17.LAHONGGUMBI	74.02.04.2052
5.	SAMPARA		
		1.ANDEPALI	74.02.05.2006
		2.ANDAROA	74.02.05.2008
		3.PUULORO	74.02.05.2009

		4.ANDADQWI	74.02.05.2012
		5.TOTOMBE JAYA	74.02.05.2027
		6.BAO-BAO	74.02.05.2028
		7.WAWOLIMBUE	74.02.05.2030
		8.BAINI	74.02.05.2036
		9.POLUA	74.02.05.2038
		10.POHARA	74.02.05.2041
		11.BONDOALA	74.02.05.2048
		12.KONGGAMEA	74.02.05.2052
		13.WOWA ANDAROA	74.02.05.2057
6.	ABUKI		
		1.SAMBEANI	74.02.10.2007
		2.ASOLU	74.02.10.2008
		3.PUNGGALUKU	74.02.10.2009
		4.WALAY	74.02.10.2012
		5.EPEEA	74.02.10.2015
		6.KUMAPO	74.02.10.2024
		7.UNAASI JAYA	74.02.10.2035
		8.KASUWURA INDAH	74.02.10.2038
		9.ARUBIA JAYA	74.02.10.2039
		10.PADANGGUNI UTAMA	74.02.10.2040
		11.ANGGORO	74.02.10.2042
7.	SOROPIA		
		1.ATOWATU	74.02.11.2002
		2.WAWORAHA	74.02.11.2004
		3.SORUE JAYA	74.02.11.2006
		4.SOROPIA	74.02.11.2010
		5.TAPULAGA	74.02.11.2011
		6.SAWAPUDO	74.02.11.2012
		7.BOKORI	74.02.11.2014
		8.SAPONDA	74.02.11.2015
		9.MEKAR	74.02.11.2016
		10.BAJO INDAH	74.02.11.2017
		11.TELAGA BIRU	74.02.11.2022
		12.LEPPE	74.02.11.2023
		13.BAJOE	74.02.11.2024
		14.SAPONDA LAUT	74.02.11.2025
8.	TONGAUNA		
		1.LALONGGOWUNA	74.02.15.2006
		2.ASAO	74.02.15.2007
		3.ANDEPOSANDU	74.02.15.2012
		4.MOMEA	74.02.15.2013
		5.AMBEPULU	74.02.15.2018
		6.WAWORODA JAYA	74.02.15.2008
		7.SANUANGGAMO	74.02.15.2009
		8.PUUNDOMBI	74.02.15.2010
		9.AMBOPI	74.02.15.2011
		10.ULUAO	74.02.15.2015
		11.NAMBEABORU	74.02.15.2016
		12.OLO ONUA	74.02.15.2017
		13.ANGGOHU	74.02.15.2014
		14.ANDALAMBE	74.02.15.2020

		15.BAROWILA	74.02.15.2019
9.	LATOMA		
		1.AMBEKAIRI UTAMA	74.02.16.2002
		2.AMBONIKI	74.02.16.2004
		3.PINOLE	74.02.16.2005
		4.WAWOLATOMA	74.02.16.2007
		5.ANDOLUTO	74.02.16.2008
		6.LALOWATA	74.02.16.2009
		7.TITIOWA	74.02.16.2010
		8.ANGONGA	74.02.16.2012
10.	PURIALA		
		1.PURIALA	74.02.17.2001
		2.SONAI	74.02.17.2003
		3.LALONGGATU	74.02.17.2004
		4.POANAHA	74.02.17.2005
		5.WONUA MOROME	74.02.17.2006
		6.AHUA WALI	74.02.17.2007
		7.WATUSA	74.02.17.2008
		8.PUUSANGI	74.02.17.2009
		9.MOKALELEO	74.02.17.2010
		10.UNGGULINO	74.02.17.2011
		11.TETEWATU	74.02.17.2012
		12.TETEHAKA	74.02.17.2013
		13.PUUHOPA	74.02.17.2014
		14.LALOONAH	74.02.17.2015
		15.WAWOSANGGULA	74.02.17.2016
11.	UEPAI		
		1.AMERORO	74.02.18.2002
		2.TAWAROTEBOTA	74.02.18.2003
		3.OLO-OLOHO	74.02.18.2004
		4.MATAHOALU	74.02.18.2005
		5.LANGGOMEA	74.02.18.2006
		6.RAWUA	74.02.18.2007
		7.BARUGA	74.02.18.2008
		8.AMAROA	74.02.18.2009
		9.TAWAMELEWE	74.02.18.2010
		10.ANGGOPIU	74.02.18.2011
		11.TAMESANDI	74.02.18.2012
		12.HUMBOTO	74.02.18.2013
		13.ANGGAWO	74.02.18.2015
		14.KASAEDA	74.02.18.2016
		15.TANGGONDIPO	74.02.18.2017
		16.PANGGULAWU	74.02.18.2018
		17.PUURODA JAYA	74.02.18.2019
12.	WONGGEDUKU		
		1.DURIAASI	74.02.19.2004
		2.LALOUSU	74.02.19.2006
		3.WAWOONE	74.02.19.2008
		4.WAWOSOLO	74.02.19.2010
		5.WAWONGGOLE	74.02.19.2012
		6.TETEMOTAH	74.02.19.2015
		7.DAWI-DAWI	74.02.19.2016

		8.BENDEWUTA	74.02.19.2017
		9.LANGGONAWA	74.02.19.2018
		10.LALOHAI	74.02.19.2019
		11.WUKUSAO	74.02.19.2020
		12.TAWAROLONDO	74.02.19.2026
		13.POLANDANGI	74.02.19.2027
		14.ANGGORO	74.02.19.2028
		15.TETEWONUA	74.02.19.2029
13.	BESULUTU		
		1.LAWONUA	74.02.20.2001
		2.AMOSILU	74.02.20.2002
		3.LALOU MERA	74.02.20.2004
		4.ASUNDE	74.02.20.2005
		5.ULUPOHARA	74.02.20.2006
		6.LABELA	74.02.20.2007
		7.RANOMOLUA	74.02.20.2008
		8.SILEA	74.02.20.2009
		9.ONEMBUTE	74.02.20.2010
		10.ANDOMESINGGO	74.02.20.2011
		11.PUULOWARU	74.02.20.2012
		12.PUUNDOHO	74.02.20.2013
		13.PUNGGALUKU	74.02.20.2014
		14.WAWORAHAI	74.02.20.2015
		15.LALOWULO	74.02.20.2016
14	BONDOALA		
		1.PEBUNOOHA	74.02.21.2002
		2.LALONGGALUKU	74.02.21.2004
		3.DIOLO	74.02.21.2009
		4.PEBUNOOHA DALAM	74.02.21.2018
		5.RUMBIA	74.02.21.2023
		6.RAMBU KONGGA	74.02.21.2028
		7.LAOSU JAYA	74.02.21.2029
		8.LALONGGALUKU TIMUR	74.02.21.2031
15.	ROUTA		
		1.TIRAWONUA	74.02.23.2002
		2.WALANDAWA	74.02.23.2004
		3.PUUWIWIRANO	74.02.23.2005
		4.TANGGOLA	74.02.23.2006
		5.LALOMERUI	74.02.23.2007
16.	ANGGABERI		
		1.LEREHOMA	74.02.24.2007
		2.WUNDUONGOHI	74.02.24.2008
17.	MELUHU		
		1.WOERAHI	74.02.25.2001
		2.LAMELAI	74.02.25.2002
		3.AHUHU	74.02.25.2004
		4.TUDAMEASO	74.02.25.2005
		5.LAROWIU	74.02.25.2006
		6.AHULOA	74.02.25.2007
		7.SAMBASULE	74.02.25.2008
		8.LALOPISI	74.02.25.2009

18.	AMONGGEDO		
		1.ANAHINUNU	74.02.28.2001
		2.ULU BENUA	74.02.28.2002
		3.PUUASANA	74.02.28.2003
		4.WATULAWU	74.02.28.2004
		5.LALONONA	74.02.28.2005
		6.AMONGGEDO	74.02.28.2006
		7.DUNGGUA	74.02.28.2007
		8.BENUA	74.02.28.2008
		9.MATABURA	74.02.28.2009
		10.WAWOHINE	74.02.28.2010
		11.MENDIKONU	74.02.28.2011
		12.AMENDETE	74.02.28.2012
		13.MATAIWOI	74.02.28.2014
		14.LALOMBONDA	74.02.28.2015
19.	ASINUA		
		1.NEKUDU	74.02.31.2001
		2.LASADA	74.02.31.2002
		3.ASINUA JAYA	74.02.31.2003
		4.ANGOHI	74.02.31.2005
		5.AWUA JAYA	74.02.31.2006
		6.AWUA SARI	74.02.31.2007
		7.ASIPAKO	74.02.31.2008
20.	KONAWE		
		1.SANGGONA	74.02.32.2005
		2.UELAWU	74.02.32.2006
		3.MOKOWU	74.02.32.2007
		4.UETE	74.02.32.2008
		5.HUDOA	74.02.32.2009
		6.WONUA MBAE	74.02.32.2010
		7.ASONIWOWO	74.02.32.2011
		8.PUWONUA	74.02.32.2012
21.	KAPOIALA		
		1.LALIMBUE JAYA	74.02.33.2002
		2.LABOTOY	74.02.33.2003
		3.MUARA SAMPARA	74.02.33.2004
		4.SAMBARAASI	74.02.33.2005
		5.LAMENDORA	74.02.33.2006
		6.TANI INDAH	74.02.33.2007
		7.PEREOA	74.02.33.2008
		8.ULU LALIMBUE	74.02.33.2009
		9.LALIMBUE	74.02.33.2010
		10.TOMBAWATU	74.02.33.2011
		11.LALONGGOMBUNO	74.02.33.2012
		12.KAPOIALA BARU	74.02.33.2013
		13.LABOTOY JAYA	74.02.33.2014
22.	LALONGGASUMEETO		
		1.TOLI-TOLI	74.02.36.2001
		2.NII TANASA	74.02.36.2002
		3.RAPAMBINOPAKA	74.02.36.2003
		4.LALOMBONDA	74.02.36.2004

		5.PUUWONUA	74.02.36.2005
		6.BUMI INDAH	74.02.36.2006
		7.LALONGGASUMEETO	74.02.36.2007
		8.TOOLAWAWO	74.02.36.2008
		9.WAWOBUNGI	74.02.36.2010
		10.BATU GONG	74.02.36.2011
		11.WATUNGGARANDU	74.02.36.2012
23.	ONEMBUTE		
		1.TRIMULYA	74.02.37.2002
		2.NAPOOSI	74.02.37.2003
		3.SILEA	74.02.37.2004
		4.ULUMERAKA	74.02.37.2005
		5.MATAIWOI	74.02.37.2006
		6.KUMAPO	74.02.37.2007
		7.KASUMEIA	74.02.37.2008
		8.ULU ONEMBUTE	74.02.37.2009
		9.TAWAPANDERE	74.02.37.2010
		10.ANGGALOOSI	74.02.37.2011
		11.ANA ONEMBUTE	74.02.37.2012
24.	PADANGGUNI		
		1.ATODOPI	74.02.38.2001
		2.MATAHORI	74.02.38.2002
		3.SAMBAOSU	74.02.38.2003
		4.MATANGGORAI	74.02.38.2004
		5.ALOSIKA	74.02.38.2005
		6.MEKAR JAYA	74.02.38.2006
		7.LANGGEA	74.02.38.2007
		8.ALEUTI	74.02.38.2008
		9.GARUDA	74.02.38.2009
		10.PADANGGUNI	74.02.38.2010
		11.PADANG MEKAR	74.02.38.2011
25.	MOROSI		
		1.MENDIKONU	74.02.39.2001
		2.WONUA MORINI	74.02.39.2002
		3.BESU	74.02.39.2003
		4.PAKU	74.02.39.2004
		5.PUURUY	74.02.39.2005
		6.MOROSI	74.02.39.2006
		7.TANGGOBU	74.02.39.2007
		8.PAKU JAYA	74.02.39.2008
		9.TONDOWATU	74.02.39.2009
		10.PORARA	74.02.39.2010
26.	ANGGALOMOARE		
		1.ANGGALOMOARE	74.02.40.2001
		2.LASOSO	74.02.40.2002
		3.LAKOMEA	74.02.40.2003
		4.ABELISAWAH	74.02.40.2004
		5.GALU	74.02.40.2005
		6.TABANGGELE	74.02.40.2006
		7.PUUSANGI	74.02.40.2007
		8.ANDOBEU JAYA	74.02.40.2008
		9.ANGGALOMOARE JAYA	74.02.40.2009

		10.PUSAWAH JAYA	74.02.40.2010
27.	WONGGEDUKU BARAT		
		1.WONGGEDUKU	74.02.41.2001
		2.PUDAY	74.02.41.2002
		3.WATURAY	74.02.41.2003
		4.TOBIMEITA	74.02.41.2004
		5.KASUKIA	74.02.41.2005
		6.BARUGA	74.02.41.2006
		7.TETEONA	74.02.41.2007
		8.AMBUUWIU	74.02.41.2008
		9.LINONGGASAI	74.02.41.2009
		10.LAMBANGI	74.02.41.2010
		11.LAHOTUTU	74.02.41.2011
		12.LAMOKUNI	74.02.41.2012
		13.RANOTUNDOBU	74.02.41.2013
		14.ANGGADOLA	74.02.41.2014



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DESA PADA WILAYAH ADMINISTRASI
 KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA

PENETAPAN DESA KARENA ADANYA PENGGABUNGAN DESA

NO.	KECAMATAN	SEBELUM PENGGABUNGAN DESA	SESUDAH PENGGABUNGAN DESA	KODE DESA
1.	LATOMA	1. LATOMA JAYA 2. AROMBU UTAMA	1. LATOMA JAYA	74.02.16.2001
		3. NESOWI 4. NAPOOHA	2. NESOWI	74.02.16.2006
2.	ROUTA	1.PARUDONGKA 2. WIAU	1. PARUDONGKA	74.02.23.2003



BUPATI KONAWE,
 KERY SAIFUL KONGGOASA